

**GERAKAN “BELA BELI” KULON PROGO
BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MENUJU KEMANDIRIAN EKONOMI
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

ARI NUGRAHA AL RASYID

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta
nugraha180@gmail.com

Abstrak

Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012. Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo yang dimulai pada tanggal 25 Maret 2013. Gerakan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo. Potensi yang penyusun teliti adalah UMKM ToMiRa, Batik Motif Geblek Renteng, serta Beras Daerah. Program ini mengajak masyarakat Kabupaten Kulon Progo untuk membeli produk – produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo dan sebagai upaya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat, kemandirian masyarakat Kulon Progo, dan menggunakan indikator dalam perspektif Ekonomi Islam. Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan wawancara ke Dinas UMKM Kulon Progo, Dinas Pertanian dan Pangan, dan masyarakat Kulon Progo yang terdiri dari 3 UMKM ToMiRa, 3 Pengrajin Batik Geblek Renteng, dan 1 Gabungan Kelompok Petani. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi dan kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat Kulon Progo, serta Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakatnya sudah sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam, yaitu kemaslahatan umat. Namun, ada kelemahan pada hasil penelitian ini bahwasannya partisipasi masyarakat Kulon Progo yang terlibat program Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo belum begitu optimal.

Kata Kunci: Bela Beli; Pemberdayaan; Kemandirian; Ekonomi Islam

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai sebuah Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak belum dapat terhindar dari masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan ketika seseorang sangat sulit

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan ada berbagai macam penyebab, salah satunya adalah masalah rendahnya tingkat penghasilan yang diperoleh (Isnaini, 2017). Seluruh program kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Berdasarkan data dari BPS persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 di Indonesia mencapai 9,41 persen atau sekitar 25,14 juta orang. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Dukungan dari sub-sistem sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdaya guna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat (Fitriasari, 2016).

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat dan melibatkan seluruh komponen permasalahan dan diperlukan strategi penanganan yang tepat dan berkelanjutan. Berlandaskan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah yaitu kabupaten atau kota dan provinsi telah diberi kewenangan secara otonom untuk mengelola daerahnya dalam bidang pemerintahan. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu daerah otonom yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan inovasi sebagai perwujudan Pemerintah Daerah dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat, melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.

Menurut data BPS, pada tahun 2012 sebelum adanya kebijakan gerakan “Bela Beli Kulon Progo”, Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu sekitar 23,31% dibandingkan dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Gunung Kidul sekitar 22,72%, Sleman 10,44%, Bantul 16,97%, dan Kota Jogja 9,38%. Berdasarkan pada data kemiskinan tahun 2012 di Daerah Istimewa

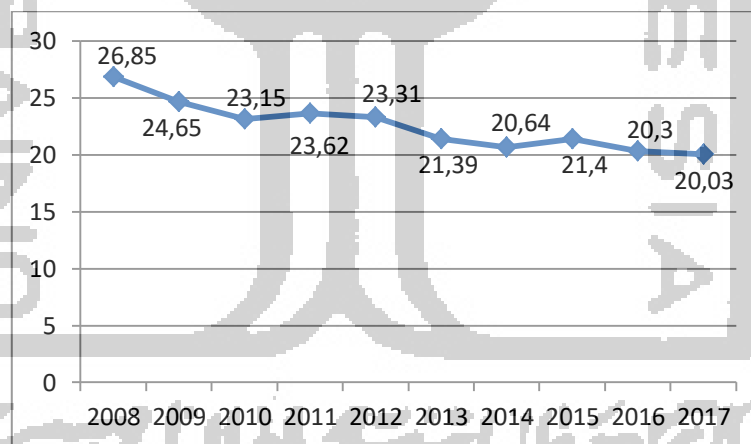
Yogyakarta, maka Kulon Progo memiliki keinginan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dibanding dengan daerah lain wilayah DIY dan dapat membuat masyarakatnya sejahtera (Susilo & Rijanta, 2016). Pada tahun 2018, setelah adanya kebijakan Gerakan “Bela Beli Kulon Progo”, Kabupaten Kulon Progo masih menjadi kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi sekitar 18,30% jika dibandingkan lagi dengan wilayah lain di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Gunung Kidul 17,63%, Sleman 7,65%, Bantul 13,43%, dan Kota Jogja memiliki tingkat kemiskinan paling rendah sekitar 6,98%.

Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo mempunyai komitmen terhadap pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, kepentingan dan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu Kabupaten Kulon Progo memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang Sehat, Mandiri, Berprestasi, Adil, Aman, dan Sejahtera Berdasarkan Iman dan Taqwa”. Visi ini dimaknai dengan tujuan untuk mewujudkan Kulon Progo yang sehat, mandiri dan berprestasi menuju masyarakat yang adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa. Salah satu upaya pemerintah demi terlaksananya visi tersebut adalah mengentaskan kemiskinan masyarakat.

Salah satu usaha Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan adalah melalui Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” yang diluncurkan pada tanggal 25 Maret 2013. Gerakan ini dibentuk dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 117 Tahun 2013 sebagai konsep aplikatif untuk menumbuh-kembangkan aktivitas perekonomian masyarakat Kulon Progo menuju tatanan perekonomian rakyat mandiri. Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” bertujuan untuk membangun kepercayaan publik tentang potensi Kulon Progo melalui beberapa program kegiatan yaitu Motif Batik Khas Kulon Progo (Batik Geblek Renteng), Beras Daerah (Rasda), Air Minum Kemasan (Air-Ku), dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa) (Wardoyo,

2016). Dalam penelitian ini, penulis fokus pada tiga program yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Motif Batik Khas Kulon Progo (Batik Geblek Renteng), Beras Daerah (Rasda), dan Toko Milik Rakyat (ToMiRa).

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” dimaksudkan untuk mengangkat perekonomian daerah dengan langkah menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di pasar sendiri di tengah gempuran produk asing. Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” merupakan salah satu program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Program ini mengajak masyarakat untuk membeli produk-produk lokal yang diproduksi oleh masyarakat Kulon Progo dan sebagai upaya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo angka kemiskinan dalam rentan waktu 2008-2017 ditunjukkan dalam Gambar 1.1



Gambar 1.1 Grafik Angka Kemiskinan Tahun 2008-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Kulon Progo

Beberapa program penanggulangan kemiskinan sebelum adanya Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo pada tahun 2008 – 2012 seperti: pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) sebagai dasar pengembangan

pemberdayaan bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan, sudah sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Meskipun, penurunan tingkat kemiskinan pada masa tersebut relatif naik turun. Pada tahun 2013 – 2017 merupakan implementasi dari Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo sebagai usaha dari penanggulangan kemiskinan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Jika diamati grafik pada gambar 1.1 bahwa sejak tahun 2013, setiap tahun angka kemiskinan relatif menurun meskipun pada tahun 2015 angka kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Kemandirian ekonomi telah menjadi tuntutan yang harus segera diwujudkan. Ketergantungan pada pihak luar akan menjadi penyebab seseorang atau keluarga untuk tidak menjadi mandiri dalam perekonomian keluarganya. Kemandirian ekonomi dapat diartikan sebagai keluarga, masyarakat maupun bangsa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Suatu kelompok masyarakat dikatakan memiliki jati diri ketika memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemandirian ekonomi (Shomedran, 2009).

Konsep kemandirian menjadi sangat penting dalam pembangunan, karena kemandirian merupakan suatu sikap yang mengutamakan kemampuan sendiri dalam menghadapi berbagai masalah untuk mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kerjasama yang saling menguntungkan. Sebagai implikasi dari berkaitannya unsur-unsur dalam konsep kemandirian, maka program dari pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam bidang ekonomi harus bisa membuat program yang tepat sasaran untuk masyarakat menengah kebawah. Program ini harus mengikutsertakan golongan menengah ke bawah untuk bisa ikut berpartisipasi, baik itu pada tingkat implementasi

ataupun tingkat pengambilan keputusan, sehingga jadinya mereka memiliki landasan bagi terbentuknya *self-management* (Mukeri, 2012).

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi yang merupakan tulang punggung kehidupan. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara menyeluruh. Syariat Islam telah mengklasifikasikan tiga aspek kegiatan ekonomi dari fungsi kesejahteraannya yakni kebutuhan (*dharuriyah*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyah*), dan kemewahan (*tahsiniyah*). *Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang paling esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan itu sendiri, baik untuk akhirat maupun duniawi (Fitriasari, 2016).

Seorang muslim tidak boleh menggantungkan sumber kehidupan kepada orang lain terus menerus. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa seorang muslim harus berusaha mencari nafkah dengan jalan yang halal. Dari nafkah halal tersebut bisa memberi nafkah untuk keluarganya serta bisa bermanfaat bagi orang sekitar. Apapun pekerjaannya asalkan sesuai dengan prinsip syariah, maka pekerjaan tersebut perlu untuk ditekuni. Dalam Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat At-Taubah 105 menjelaskan bahwa setiap manusia harus bekerja:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ اَعْلَامِ الْعُيُبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [٩:١٠٥]

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah (9) : 105).

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya ada ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintah-perintahNya. Jika dikaitkan dengan kemandirian ekonomi adalah bahwa Allah SWT memberikan manusia anugerah berupa sumber kehidupan dan menyuruh manusia untuk tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah SWT. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan apa yang telah dilakukannya yaitu manajemen dalam hidup yang tidak melanggar ketentuan syariat.

Kemandirian ekonomi yang ditekankan syariat adalah kemauan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja keras agar dapat terhindar dari sikap meminta-minta. Dalam ajaran Islam, perilaku meminta-minta adalah pekerjaan yang hina dan harus dijauhi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Islam tidak melarang umatnya untuk menerima pemberian dari orang lain, akan tetapi menjadi pemberi jauh lebih dan mulia dibanding dengan meminta. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ [٦٧:١٥]

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*. (Al- Mulk: 15).

Dalam ayat di atas menjelaskan ajakan kepada umat manusia secara umum dan umat muslim secara khusus agar bisa memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi setelahnya. Allah SWT memerintahkan manusia agar mampu berusaha dan mengelola alam untuk kepentingan masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh rezeki yang halal. Hal ini menandakan bahwa Allah SWT tidak menyukai orang yang memiliki sifat pemalas. Karena Allah SWT lebih menyukai orang yang berusaha dan mencari rezeki, karena hal itu termasuk ibadah (Shihab, 2012). Al-Qardhawi menjelaskan bahwa dalam

Islam, tidak dibenarkan seseorang hidup dalam kondisi miskin dan berusaha agar tidak terjerumus dalam lingkaran kemiskinan. Hal ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan serta ketentraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat (Qardhawi, 2002).

Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” memiliki empat gagasan yang saling terkait antara satu sama lain. Keempat gagasan tersebut adalah: Pertama, gerakan “Bela Beli Kulon Progo” dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta bagi masyarakat terhadap produk-produk lokal. Kedua, gerakan menciptakan pasar serta menggalakan produk-produk unggulan daerah. Ketiga, mengadakan gerakan hidup sederhana yang dapat menekan pengeluaran yang tidak penting. Keempat, gerakan kesadaran akan pentingnya kepedulian sosial serta gotong royong di tengah masyarakat. Keempat gagasan ini tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berkontribusi secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat memenangkan persaingan pasar bebas (Wardoyo, 2016). Gerakan Bela Beli Kulon Progo dimaksudkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat Kulon Progo akan kecintaan, kepedulian, dan keberpihakan terhadap produk-produk lokal dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi lokal Kulon Progo.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menjadi tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini karena ingin mengulas mengenai konsep pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Gerakan “Bela Beli Kulon Progo” serta bagaimana caranya mewujudkan kemandirian ekonomi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gerakan “Bela Beli” Kulon Progo Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam”

B. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah dalam Islam

Kebijakan publik menurut Islam harus berdasarkan pada *tauhid* yang mengandung beberapa karakteristik seperti: Pertama, diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya alam secara efisien untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, menumbuhkan peranan individu dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Ketiga, menumbuhkan proses kebersamaan yang akan memberikan peluang bagi berkembangnya kreativitas. Keempat, dapat menciptakan distribusi pendapatan secara adil dan merata. Kelima, menjaga stabilitas dan keberlangsungan perkembangan ekonomi dalam proses kemajuan (Rahardjo, 1992).

Islam beranggapan bahwa tanggung jawab pemerintah bukan hanya sebatas pada faktor keamanan, akan tetapi pertanggungjawaban pemerintah merupakan bagian dari program pencapaian masyarakat yang ideal yaitu makmur dan adil. Keadilan dalam masyarakat tidak akan tercipta jika tanpa ketelibatan pemerintah dalam membela golongan yang lemah dan memberikan pertolongan kepada mereka dalam masalah yang menyangkut mengenai perekonomian (An-Nabahan, 2000).

2. Gerakan Bela Beli Kulon Progo

Gerakan Bela Beli Kulon Progo memiliki indikator keberhasilan yang hendak dicapai melalui pemberdayaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan empat aspek (Wardoyo, 2016), diantaranya adalah:

a. Terciptanya Suasana yang Memungkinkan Potensi Masyarakat untuk Berkembang

Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Melalui

Gerakan Bela Beli Kulon Progo dapat terciptanya pasar lokal dengan potensi yang tersedia.

b. Memperkuat Potensi yang Dimiliki Masyarakat

Perkuatan ini bisa melalui langkah-langkah penyediaan berbagai masukan, serta bisa juga melalui pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat Kulon Progo menjadi berdaya. Pemerintah Daerah mendukung pengembangan potensi yang ada di masyarakat, sehingga produk-produk yang telah dihasilkan dapat diterima oleh pasar lokal, nasional dan sampai dengan lingkup Internasional.

c. Perlindungan terhadap Orang yang Belum Berdaya

Dalam proses pemberdayaan dapat mencegah masalah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan ketika menghadapi yang kuat. Untuk itu, pemihakan serta perlindungan kepada yang lemah amat dasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kulon Progo tidak hanya menjalankan fungsi sebagai fasilitator, akan tetapi memiliki fungsi sebagai regulator dalam rangka pemihakan dan perlindungan kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelemahan daya saing sebagai keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, modal dan pasar.

d. Menanamkan Nilai-Nilai Kecintaan dan Kebanggaan terhadap Produk-Produk Lokal Kulon Progo

Nilai dan spirit tersebut akan merubah pola pikir masyarakat akan betapa pentingnya rasa nasionalisme dalam mewujudkan kemandirian tanpa harus tergantung dan didikte oleh pihak asing.

3. Kemiskinan dalam Islam

Menurut pandangan Islam, tidak dibenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun warga non muslim menderita lapar, tidak berpakaian, tidak bertempat tinggal dan membujang. Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha untuk membendung serta

mengawasi kemungkinan yang terjadi yang dapat membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat (Qardhawi, 2002). Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana bahayanya kemiskinan (kefakiran), bahkan beliau menggambarkan bahwasannya kefakiran mendekati kekufuran. Kekafiran dan kekufuran mempunyai keterkaitan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri dan dengki akan mampu melenyapkan kebaikan. Mereka pun mulai menumbuhkan kehinaan di dalam hati mereka, di saat mereka mulai melancarkan segala daya upayanya demi mencapai tujuan kedengkian mereka tersebut (Huda, 2015).

Dalam *fiqih*, dibedakan antara istilah Fakir dan Miskin. Menurut pengertian *syara'*, Fakir adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Sedangkan Miskin adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Dari pengertian kedua istilah Fakir dan Miskin sebenarnya Fakir telah mencakup kriteria Miskin (Mujahidin, 2008). Isu kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari konsep kebutuhan minimal. Dalam Islam, definisi kebutuhan pokok ini bukan hanya terkait dengan aspek kebutuhan materil semata, namun juga terkait dengan aspek kebutuhan spiritual dan beribadah kepada Allah SWT. Kebutuhan pokok meliputi: 1) dapat melaksanakan ibadah; 2) terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan; serta 3) hilangnya rasa takut. Dengan demikian, dimensi kebutuhan pokok ini bersifat multidimensi, di mana tidak hanya materiil namun juga spiritual, serta tidak hanya bersifat duniawi, melainkan juga ukhrawi (Aprianto & Edwin, 2017).

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Islam

Konsep partisipasi dalam Islam sangat penting untuk dilakukan sebagai efek dari pengembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat memiliki dua

ukuran yang perlu dilakukan yaitu memberikan manfaat antar masyarakat lain dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam suatu komunitas. Selain itu, Islam memberikan peluang bagi semua anggota masyarakat yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka sendiri. Artinya, setiap anggota masyarakat dalam suatu komunitas memiliki kemampuan khusus untuk terlibat dalam suatu komunitas. Partisipasi harus mendapat dorongan dari anggota masyarakat lainnya (Zal, 2012).

Islam juga mengakui potensi yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat dalam suatu kelompok. Potensi ini diperlukan dalam setiap komunitas yang berbeda sebagai upaya untuk berkembang. Perbedaan berfungsi sebagai kekuatan bagi mereka untuk mencari pendekatan yang lebih baik, Islam melarang melakukan pelecehan terhadap kelompok lain (Zal, 2012). Konsep pemberdayaan Islam menjelaskan bahwa dalam pemberdayaan terdapat dua unsur diantaranya yaitu orang atau lembaga yang memberdayakan dan orang atau kelompok yang diberdayakan. Dalam Islam, pemberdayaan merupakan proses tolong-menolong (Istan, 2017).

Menurut Jaelani (2014) jika diteliti lebih dalam, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu, pelaksanaan etika yang sesuai dengan ketentuan syari'ah mengenai persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Misalnya tidak boleh melakukan penimbunan barang ketika sedang mengalami kelangkaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, menyuap pejabat untuk mendapatkan pesanan, dan menipu konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan. Etika bisnis sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku ekonomi agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan benar.

5. Kemandirian Ekonomi

Menurut Benny Susetyo (2006), seseorang dapat dikatakan secara mandiri dalam ekonomi apabila telah telah memenuhi lima aspek ini, diantaranya adalah:

a. Bebas Hutang Konsumtif

Ada dua jenis hutang jika ditinjau dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif yaitu hutang yang digunakan untuk kebutuhan yang dapat menghasilkan keuntungan, seperti memulai usaha, membeli tanah, dan sejenisnya. Kedua, hutang konsumtif yaitu hutang yang jika digunakan tidak akan menambah penghasilan, seperti membeli alat elektronik dan sejenisnya untuk mengikuti gaya hidup.

b. Memiliki Keyakinan dalam Bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan dalam bisnis tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya atau bisa dibilang konsisten dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya sedang naik atau sedang sepi. Pelaku usaha akan terus memantau bisnisnya agar tidak memproduksi barang yang kurang penting.

c. Memiliki Investasi

Investasi yaitu menanamkan modal dengan harapan nantinya modal tersebut akan bertumbuh, modal disini tidak hanya sebatas uang melainkan modal pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Seseorang pelaku usaha yang mempunyai investasi dinilai memiliki pandangan jauh kedepan, dengan cara melihat hasil akhir dari proses suatu usaha yang telah berjalan. Bahkan jika terjadi kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, dengan membuat pandangan seorang investor semakin tajam.

d. Mampu Mengelola Keuangan

Arus kas memiliki arti aliran dana masuk dan dana keluar milik perorangan maupun perusahaan. Aliran dana masuk biasanya disebut dengan pendapatan dan aliran dana keluar disebut dengan pengeluaran.

Sebuah arus kas dinilai baik ketika pengeluaran perorangan ataupun perusahaan lebih sedikit dari pendapatannya, sehingga sisanya bisa ditabung atau diinvestasikan. Arus kas dinilai buruk apabila pengeluaran lebih banyak dari pada pendapatan, sehingga untuk menutupi pengeluaran tersebut, dia akan melakukan pinjaman atau menjual aset yang dimilikinya.

e. Memiliki Kesiapan Mental

Kesiapan fisik seseorang dalam menjalankan usaha seperti memiliki modal, tabungan, asuransi, pengalaman adalah penting. Namun, aspek mental menjadi sangat penting karena terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh bangun dalam membangun usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka para pelaku usaha yang memiliki mental bangkit dari setiap keterpurukan akan lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya. Mental seseorang akan mempengaruhi usahanya untuk cepat berkembang dan sukses.

C. Metode Penelitian

Penyusun menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan cara menggunakan pendekatan penelitian wawancara. Objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai pembuat kebijakan Gerakan Bela Beli Kulon Progo dan masyarakat, yang meliputi populasinya adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo serta sampel yang diambil penulis yaitu beberapa orang masyarakat Kulon Progo yang terdampak dari kebijakan Bela Beli, yang terdiri dari 3 pelaku UMKM ToMiRa, 3 Pengrajin Batik Geblek Renteng, dan 1 Gabungan Kelompok Petani.

Penyusun juga menggunakan metode dokumentasi dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini hasil publikasi dari instansi pemerintah Kulon Progo dan lembaga-lembaga terkait. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik triangulasi sumber. Penyusun membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian seperti pada pemerintah daerah Kulon Progo dan dari masyarakat Kulon Progo yang terdampak dari adanya kebijakan Bela Beli Kulon Progo.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasanya Gerakan Bela Beli Kulon Progo merupakan implementasi dari visi dan misi yang sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kulon Progo 2011 – 2016. Secara keseluruhan, program – program Bela Beli Kulon Progo yang dibahas oleh penulis memiliki tujuan yang sama yaitu memperkuat potensi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, peningkatan dan penguatan ekonomi lokal Kulon Progo dan menyejahterakan masyarakat.

Program ToMiRa dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. Adapun sasaran dari program ToMiRa ini adalah koperasi – koperasi yang ada di Kulon Progo, para pelaku UMKM Kulon Progo, dan seluruh masyarakat Kulon Progo. Program ToMiRa merupakan bagian dari Gerakan Bela Beli Kulon Progo karena memberikan kesempatan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan produk lokal dan memberikan perlindungan kepada pasar tradisional.

Program Batik Geblek Renteng pelaksanaannya berdasarkan dengan adanya Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 025/2171, 2 Juli 2012 mengenai Penggunaan Pakaian Batik Motif Geblek Renteng. Program Batik

Geblek Renteng memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh para pengrajin batik, meningkatkan promosi batik lokal, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun sasaran dari Program Batik Geblek Renteng adalah masyarakat pengrajin Batik serta seluruh masyarakat Kulon Progo.

Program Rasda (Beras Daerah) dan Program Beras PNS dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan mewujudkan slogan “*Madhep Manthep Mangane Pangane Dhewe*” (Siap dan mantap dengan makanan yang dihasilkan sendiri). Tujuan Program Rasda dan Beras PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di Kulon Progo. Program Rasda merupakan perwujudan dari Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 dengan mewujudkan keterjangkauan pangan dengan melaksanakan kebijakan di bidang pangan. Sedangkan, Beras PNS merupakan kebijakan dari Bupati Kulon Progo melalui Surat Edaran Bupati Kulon Progo Nomor 500/5231 Tahun 2015 menghimbau seluruh PNS di Kulon Progo untuk membeli Beras “SEHAT” hasil produksi Gapoktan di Kulon Progo. Adapun sasaran dari Program Rasda dan Beras PNS adalah para petani di Kulon Progo, masyarakat penerima Rasda, PNS Kulon Progo, dan seluruh masyarakat Kulon Progo.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, ada beberapa aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan antara Gerakan Bela Beli Kulon Progo dengan ekonomi Islam. Pertama, Potensi Masyarakat Kulon Progo dalam Ekonomi Islam sebagai upaya untuk berkembang dan tidak boleh menghina potensi kelompok lain. Kedua, Partisipasi Masyarakat Kulon Progo dalam Ekonomi Islam memberikan manfaat antar kelompok masyarakat Kulon Progo dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kulon Progo. Ketiga, Tolong Menolong dalam Ekonomi Islam merupakan proses pemberdayaan yang memiliki dua unsur, diantaranya ada lembaga yang memberdayakan atau Pemerintah Daerah Kulon Progo dan kelompok yang diberdayakan atau

masyarakat Kulon Progo. Keempat, Etika Bisnis dalam Ekonomi Islam tidak diperbolehkan melakukan penimbunan barang, menyuap pejabat untuk mendapatkan pesanan, dan menipu konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Susilo (2016) menjelaskan bahwa, kendala utama dari pengembangan implementasi Gerakan Bela Beli Kulon Progo adalah ada pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat pada program tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya, ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melakukan pemberdayaan ke masyarakat Kulon Progo, terutama pada pelatihan mengenai kewirausahaan online ada beberapa masyarakat yang sulit untuk memahami materi yang telah disampaikan. Dikarenakan, ada beberapa masyarakat yang mengalami penyakit Gaptex (Gagap Teknologi) yang belum begitu mengetahui dunia internet. Masalah Gaptex masyarakat Kulon Progo rata – rata dipengaruhi oleh faktor usia.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianto (2015) terutama pada partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan Bela Beli Kulon Progo, bahwasannya partisipasi masyarakat Kecamatan Kalibawang sudah kelihatan ada akan tetapi belum optimal, dikarenakan hanya kelompok – kelompok tertentu saja yang terlibat dalam program Bela Beli Kulon Progo. Penulis sepakat dengan hasil penelitian tersebut bahwasannya partisipasi masyarakat kurang optimal. Pada penelitian ini ruang lingkupnya lebih luas yaitu partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kristianto (2015) yaitu partisipasi masyarakat Kalibawang.

Partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo tidak semua kelompok yang terlibat pada Gerakan Bela Beli Kulon Progo, contohnya seperti pada program Rasda dan Beras PNS yang terlibat dalam distribusi beras daerah

hanya 12 Gapoktan (Gabungan Kelompok Petani). Sedangkan, di Kulon Progo sendiri di setiap desa ada Gapoktan, yang jumlah desanya ada 88 desa berarti ada 88 Gapoktan di Kulon Progo. Pada Program ToMiRa, Partisipasi UMKM lokal yang memasukan produknya ke ToMiRa hanya beberapa puluh saja. Sedangkan, jumlah UMKM di Kulon Progo bisa sampai tiga ribu. Begitu juga dengan partisipasi pengrajin batik Geblek Renteng, yang tidak semua pengrajin terlibat pada pendistribusian seragam Batik Geblek Renteng, untuk Siswa Sekolah dan PNS di Kulon Progo. Atas dasar permasalahan partisipasi yang sudah dijelaskan penulis, bahwa perlunya optimalisasi partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan informasi program dan mendampingi masyarakat Kulon Progo yang ingin terlibat pada program Bela Beli Kulon Progo.

Selanjutnya, ada penelitian yang telah dilakukan oleh Rizal (2011) yang menyatakan bahwa Ekonomi Islam mempunyai tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan, yaitu kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi untuk semua orang harus berlandaskan pada norma dan etika. Perbedaan pada penelitian ini adalah penulis menganalisis program Bela Beli Kulon Progo dalam perspektif ekonomi Islam kedalam empat aspek, diantaranya ada potensi masyarakat, partisipasi masyarakat, tolong menolong (*ta'awun*), dan etika bisnis Islam. Sedangkan Rizal (2011) dalam penelitiannya mensinergikan ekonomi Islam dengan ekonomi kerakyatan yang secara landasan hampir serupa.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara ke Pemerintah Daerah Kulon Progo dan Masyarakat Kulon Progo, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kulon Progo dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kulon Progo. Pada UMKM pemberdayaannya meliputi aspek kelembagaan, aspek usaha dan

SDM, serta permodalan. Pada Pengrajin Batik meliputi sosialisasi peningkatan legalitas, pelatihan dan pengembangan dalam menjalankan usaha batik, perluasan jaringan kerjasama, dan inovasi pengembangan motif batik. Pada Petani Beras meliputi pemberdayaan aspek produksi dan pemasaran, peningkatan kualitas standar mutu beras, serta dukungan fasilitas dan dana.

Gerakan Bela Beli Kulon Progo memberikan dampak positif kepada masyarakat yang terlibat. Dampak yang dihasilkan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu menurunkan tingkat angka pengangguran dan membuat masyarakat menjadi mandiri secara ekonomi. Gerakan Bela Beli Kulon Progo yang menjadi indikator dalam perspektif Ekonomi Islam meliputi potensi masyarakat sebagai upaya untuk berkembang, partisipasi masyarakat harus bisa memberikan manfaat antar kelompok masyarakat, tolong menolong meliputi lembaga yang memberdayakan dan kelompok yang diberdayakan, dan etika bisnis yang berisi larangan melakukan penimbunan barang, menyuap pejabat untuk mendapatkan pesanan, dan menipu konsumen dengan menjual produk yang tidak sesuai.

F. Daftar Pustaka

- An-Nabahan, F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press.
- Aprianto, K., & Edwin, N. (2017). *Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 8(2), 169–188.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Adhi Mahasatya.
- Fitriasari, F. (2016). Sinergi Ekonomi Islam untuk Menanggulangi Kemiskinan. *Iqtishoduna*, 7.

- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Isnain, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*, 2.
- Istana, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics*, 2.
- Jaelani, D. I. (2014). PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Sebuah Upaya dan Strategi). *Ekonomi Syariah*, 1, 22–23.
- Mujahidin, A. (2008). Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 7, 169.
- Mukeri. (2012). Kemandirian Ekonomi Solusi Untuk Kemajuan Bangsa. *Jurnal Universitas Pandanaran*, 10, 3.
- Qardhawi, Y. (2002). *Teologi Kemiskinan; Doktrin Dasar dan Solusi Islam Atas Problem Kemiskinan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Rahardjo, D. (1992). *Kebijaksanaan Fiskal dan Ekonomi Publik Dalam Islam*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shomedran. (2009). *Pemberdayaan Partisipatif Dalam Membangun Kemandirian Ekonomi dan Perilaku Warga Masyarakat*.
- Susetyo, B. (2006). *Teologi Ekonomi "Partisipasi Kaum Awam dalam Pengembangan Menuju Kemandirian Ekonomi*. Malang: Averoes Press.
- Susilo, E. G. B., & Rijanta. (2016). *Kajian Implementasi "Bela Beli Kulon Progo"*

(Kasus : AirKu, Batik Geblek Renteng dan Tomira).

Wardoyo, H. (2016). *Bela Beli Kulon Progo*. Yogyakarta: Pusat Studi Kebijakan Daerah.

Zal, A. (2012). Selected Concepts of Community Development and Operasional Explanation from Islamic Context. *Research on Humanities and Social Sciences*, 2, 74.

